



**DAMPAK SENGKETA KEPULAUAN SENKAKU ANTARA JEPANG - CINA
TERHADAP STABILITAS KEAMANAN JEPANG**

Tjhang Zahra Anisa Pramaiseilla

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang.

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Senkaku Islands are rich in oil and gas resources, which has led Japan and Cina to claim each other that the Senkaku Islands belong to them. The impact of the dispute on Japan's security stability makes the senkaku islands and Japanese territories threatened and insecure because Cina conducts military operations by arming fishermen to become "maritime militias" and Cina has also increased their air activities, conducted training for their pilots and even created and enforcing air defense zones so that Japan's security stability becomes insecure and causes the Japanese state to be wary of attacks given by Cina because Cina sends military forces to Japan's territory which makes the Japanese region less secure while it has an impact on the economy and relations between Japan and the United States. Cina is going bad. The Japanese government's passive attitude that has been applied so far has turned into a proactive one by strengthening the military and surveillance system with advanced technology. To improve its national security, Japan increased their military budget and created military bases to deal with possible invasions from Cina in certain places around the Senkaku Islands.

This study uses qualitative methods with descriptive explanatory data collection techniques. Techniques for data collection were carried out using literature studies obtained from journals, articles and books. The author will analyze the data with Process Tracing which will track a conflict process that can occur and explain the data according to the

framework of each country's thinking because Japan and Cina mutually claim the Senkaku island belongs to each other and are a threat to the security of the Japanese region. The author uses the concept of National Security in analyzing the dispute between the senkaku islands of Japan and Cina as well as threats to the security stability of the Japanese region.

Keywords: Dispute, Japan, Cina, Senkaku Island, UNCAFE, National Security.

PENDAHULUAN

Sengketa yang terjadi antara negara Jepang dan Cina mengenai kepemilikan Kepulauan Senkaku ini telah berjalan kurang lebih dari satu abad. Pada awal tahun (1894-1895) Kepulauan Senkaku masih merupakan pulau yang tidak di miliki baik Jepang maupun Cina. Pada tahun 1895 peperangan antara Jepang dan Cina terjadi dan kemenangan diperoleh diraih oleh pihak Jepang atas Cina. Kekalahan yang dialami oleh pihak Cina tersebut membuat Jepang secara resmi mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku milik Jepang. Kedua pihak terus bekerja keras untuk membuktikan kedaulatannya sampai pada akhirnya kedua negara bertemu untuk menandatangani *Japan-China Peace and Friendship Treaty*, yang menyatakan bahwa sengketa Kepulauan Senkaku ini akan dikesampingkan dan akan diselesaikan oleh generasi selanjutnya (Cheng, 2008).

Adapun berita terbaru terkait jepang dan china dalam konflik pulau senkaku adalah jepang meminta dukungan dari negara lain, yaitu Amerika Serikat. Letnan Jenderal Kevin Schneider 100% berkomitmen penuh untuk memberikangan dukungan kepada pemerintah Jepang atas Kepulauan Senkaku ketika berbicara tentang pulau-pulau AS yang dikendalikan oleh Jepang. Schneider kemudian percaya bahwa Jepang tidak melanggar masalah Kepulauan Senkaku, dan Amerika Serikat mempercayai sepenuhnya pendapat tersebut. (Kompas, 2021)

Schneider sebagai Letnan Jenderal Amerika Serikat, dikatakan bahwa Amerika Serikat telah memberikan pengawasan informasi serta dukungan lainnya, yang

merupakan semacam "Kemampuan Pengintaian" yang berpacu kepada pantauan dari keberadaan musuh. Perangkat ditawarkan untuk pengintaian guna membantu Jepang "Menilai Situasi dan Untuk Mencari Tahu Apa yang Sebenarnya Terjadi di Dalam Air dan di Sekitar Senkaku".(Kompas, 2021) Dalam hal ini Amerika Serikat bukan hanya mendukung protes Jepang kepada Cina atas sengketa Pulau Senkaku tetapi juga menawarkan bantuan berupa alat pengintai kepada Jepang. Selain itu sistem transportasi Jepang sangat berkembang, dengan jaringan jalan dan kereta api yang menjangkau hampir setiap bagian wilayah Jepang, bersama dengan layanan angkutan udara dan laut yang luas.

Lalu untuk kekuatan ekonomi Cina menganggap ekonomi jadi kunci utama keberhasilan Cina Kesuksesan Cina ini berawal diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping (1978-1989). Reformasi telah membawa perekonomian Cina yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat Cina berhasil menyalip Jepang pada tahun 2010. Setelah berhasil menggeser Negeri Sakura pada 2010, saat ini Cina masih bertengger sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Bahkan beberapa ekonom meramal Cina akan mengungguli rivalnya yaitu AS pada 2030 jika laju pertumbuhan ekonomi Cina terus menerus fantastis. Pada kondisi global yang berubah karena berkembangnya teknologi saat ini membuat Cina semakin memantapkan posisinya dengan ambil andil sebagai pemain di sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi Cina telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Contoh nyatanya adalah produk ponsel pintar seperti Xiaomi, Huawei, OPPO dan Vivo. (cnbcindonesia, 2014)

Sementara itu di Asia juga memiliki kawasan dengan tingkat perekonomian yang dinamis di dunia serta menjadi mesin ekonomi dari perekonomian global, Karena kawasan ini terus menjadi kawasan yang paling dinamis dalam ekonomi global. Prospek jangka pendek telah membaik sejak edisi terakhir Regional Economic Outlook Update Kuat dan luasnya pertumbuhan dan perdagangan global, yang didorong oleh stimulus fiskal AS, diharapkan dapat mendukung ekspor dan investasi di Asia, sementara kondisi keuangan yang akomodatif diperlukan untuk mendukung

permintaan domestik. Pertumbuhan Tiongkok diproyeksikan akan turun menjadi 6,6 persen sebagai cerminan dari langkah-langkah pengetatan keuangan, perumahan, dan fiskal pemerintah. Pertumbuhan di Jepang telah berada di atas potensi selama delapan triwulan berturut-turut dan diperkirakan akan tetap kuat tahun ini pada 1,2 persen. Di India, pertumbuhan diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 7,4 persen.

Berdasarkan latar belakang tersebut pertanyaan penelitian yang akan dijelaskan serta dianalisis dalam tulisan ini ialah *“Bagaimana dampak Konflik Kepulauan Senkaku terhadap stabilitas keamanan Jepang?”*

KERANGKA TEORI

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Efendi (yang berjudul “Prediksi Penyelesaian Sengketa Antara Cina – Jepang dalam Perebutan Pulau Diaoyu / Senkaku” (Efendi, 2013) , menjelaskan alur dan awal mula sengketa ini lalu penulis lebih fokus menulis mengenai prediksinya mengenai penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku ini, ia menjelaskan bahwa dengan cara berperang dapat menyelesaikan sengketa kepulauan senkaku ini, peneliti mencari data dan indikasi – indikasi yang mengarah pada perang yang pertama adanya rencana Jepang untuk meningkatkan 5% untuk belanja militer selama lima tahun kedepan dengan tujuan untuk memperkuat militer, kedua, terdapat survei TBS TV di Tokyo yang dilakukan Cina sekitar 55% warga yang berada di Cina siap perang dengan Jepang. Ketiga, negara Cina telah mengirimkan dua bomber XianH-6 guna melintasi perairan di sekitaran Miyakojima dan Okinawa. Penulis lebih berfokus pada menacri kekuatan – kekuatan masing – masing negara untuk menyusun strategi perang dan menurut penulis solusi untuk menyelesaikan sengketa ini adalah melalui perang.

Penelitian ini berbeda karena berusaha menawarkan penelitian baru mengenai bagaimana dampak sengketa Kepulauan Senkaku terhadap stabilitas keamanan Jepang. dan hubungan bilateral beserta bagaimana usaha yang dapat dilakukan kedua negara untuk menemukan titik tengah antara Jepang dan Cina, kemudian penulis mencoba menelisik lebih dalam lagi mengenai Sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina terhadap ancaman kepada stabilitas keamanan Jepang. Untuk kabar terkini mengenai Sengketa ini petugas kepolisian Jepang meningkatkan pertahanan di

pulau – pulau kecil disekitar Laut Cina Timur, dimana kawasan ini merupakan kawasan yang diperebutkan Cina. Sehingga dalam penelitian kali ini penulis lebih memfokuskan mengenai bagaimana dampak sengketa kepulauan senkaku terhadap stabilitas keamanan Jepang.

Konsep Keamanan Nasional. Hingga kini istilah dari keamanan yaitu memiliki arti atau definisi yang universal yang masi bereaneka macam, maka dari itu arti dari keamanan sendiri bergantung pada kata yang mengikutinya. Berikut keamanan dikategorikan beberapa macam sebagai: (1) National (State) Security negara, (2) International Security, untuk level dunia (3) Human Security, untuk level individu., dan (4) Public Security (and Order). Menurut Barry Buzan ia mengatakan, “*If a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture.*” (Barry Buzan, 1991, hal 18)

Buzan membagi ruang lingkup masalah keamanan menjadi lima sektor dan mengidentifikasi interaksi yang terjadi di masing-masing sektor. Tema-tema yang diangkat oleh Buzan adalah: Sektor militer (dipaksa). Wilayah politik (otoritas, status dan persetujuan pemerintah); sektor ekonomi (perdagangan, manufaktur, keuangan); domain sosial (identitas kolektif); sektor lingkungan (aktivitas manusia dan biosfer planet). Terlepas dari itu tidak hanya actor yang terlibat tidak hanya negara, akan tetapi terdapat organisasi internasional (global dan regional) Selain itu, aktor yang terlibat tidak lagi hanya negara, tetapi organisasi internasional (global dan regional), organisasi non-pemerintah (global, regional dan lokal), kelompok pemangku kepentingan dan kelompok pemangku kepentingan (perusahaan multinasional dan multinasional, epistemic, Individu, Partai-partai politik). ([Barry Buzan, 1991, hal 21-24](#)) Selain itu, Buzan menyatakan bahwa kepentingan nasional menentukan sifat dari agenda di atas. Karya yang berjudul *People, States, and Fear* ini merupakan karya Buzan yang bertujuan untuk memperluas tantangan keamanan nasional. Buzan berusaha memperluas agenda keamanan dalam bukunya, tetapi prasangka yang berpusat pada negara tetap jelas. (Barry Buzan, Op Cit.,halaman 19-20) Menurut David A. Baldwin pada tulisannya yang berjudul “*The Concept of Security*”(1997) Secara konseptual, keamanan masih belum dipahami dengan baik,

terutama sejak abad ke-19. Masih ada anggapan bahwa konsep keamanan perlu diperbaiki atau dikritisi karena kurangnya analisis terhadap konsep keamanan. Jika Bazzan mencoba merangkum lima alasan mengapa orang mengabaikan konsep keamanan, konsep tersebut sulit dipahami, yaitu konsep keamanan dan kekuasaan yang tumpang tindih, kritikus realis kurang tertarik pada keamanan, dan pakar keamanan terlalu sibuk. Ada ambiguitas tentang "keamanan nasional" untuk mengikuti kemajuan teknologi dan politik. (Baldwin, 1997). Baldwin berpendapat, *“the point of departure is Wolfers’ characterization of security as ‘the absence of threats to acquired values’, which seems to capture the basic intuitive notion underlying most uses of the term security”*.

Keamanan Nasional (Keamanan) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Di sisi lain, tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu utama kontroversi politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain (Kolodziej, 2005) security atau keamanan sendiri dapat diartikan berguna untuk menjaga wilayah teritorial atau keutuhan teritorial negaranya lalu ancaman yang akan mulai muncul dari luar, seperti konflik antar negara guna untuk meluaskan wilayah maupun daerah dan membawa arti security untuk ditunjukkan ke negara guna menambah power negara tersebut dalam menghadapi ancaman militer dan menjaga keamanan negaranya (Al Araf & Aliabbas, 2007). Konsep keamanan dengan perhatian tradisional lebih fokus kepada negara sebagai unit dasar hanya dengan sektor militer dan politik. Jelas sekali bahwa konsep keamanan dalam konteks militer-politik dapat diartikan sebagai cara bertahan hidup menurut isu-isu keamanan tradisional. Ketika masalah disajikan sebagai ancaman yang terkait dengan objek seperti negara, pemerintah, wilayah atau masyarakat.

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian yang akan penulis gunakan dalam mengkaji kasus ini ialah metode penelitian kualitatif, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan, memilih,

mengkategorikan, dan kemudian menjelaskan data dari dampak sengketa kepulauan senkaku antara Jepang – Cina terhadap kestabilan keamanan Jepang

PEMBAHASAN

Profil Kepulauan Senkaku

Kepulauan Senkaku atau biasa disebut Diaoyu merupakan kepulauan yang terletak di Laut Tiongkok Timur, yang lebih tepatnya ada pada Timur Republik Rakyat Tiongkok, dan sebelah selatan negara Jepang lalu sebelah Utara dari Reoublik Tiongkok atau negara Taiwan. Kepulauan Senkaku ini berada pada garis koordinat $25^{\circ}47'53''$ *Lintang Utara dan* $124^{\circ}03'21''$ Bujur Timur, kepulauan ini hanya memiliki luas 7 km². Kepulauan Diaoyu atau Senkaku terdiri dari serangkaian lima pulau besar dan tiga karang, dari lima pulau dan tiga karang yang ada di Kepulauan Diaoyu/Senkaku tersebut, dan tidak ada satu pun dari semua itu yang berpenghuni pada tahun 2010 meskipun pada awal abad ke-20 sempat berpenghuni sekitar 200 jiwa yang merupakan pekerja untuk sebuah perusahaan ikan makarel. (Christianty & Dkk, 2019). Dalam perselisihan sengketa ini Kepulauan Diaoyu atau biasa disebut Senkaku ini Cina dan Jepang memiliki klaim kepemilikan yang berbeda. Yang mana klaim tersebut memiliki pendekatan – pendekatan yang berfungsi sebagai dasar pendukung klaim dari kedua negara tersebut. (Christianty & Dkk, 2019)

Kepulauan Senkaku adalah sekelompok pulau yang terletak di Kota Ishigaki, Prefektur Okinawa, yang meliputi Kepulauan Uotsuri, Kitakojima, Minamikojima, Kuba, Taisho, Okinokitaiwa, Okinominamiwa, dan Tobise. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016).

Kepulauan Senkaku memiliki berbagai macam tumbuhan dan hewan termasuk spesies endemik. Laut di sekitarnya juga merupakan temoat memancing yang sangat kaya akan sumber daya alam laut, setelah Kepulauan Diaoyu atau Senkaku pada tahun 1895 masuk kedalam wilayah Jepang silam warga Jepang menetap di Kepulauan tersebut dan menjalankan bisnis seperti pembuatan bonito kering dan pengumpulan bulu burung selama puncaknya lebih dari 200 orang Jepang tinggal di Kepulauan Senkaku (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016)

Pemerintah Negara Jepang memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa pulau Senkaku adalah sebagai wilayah yang berada di kawasan negara Jepang. Pemerintah China tidak menentang kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku selama kurang lebih 75 tahun, setelah masuknya Kepulauan Senkaku pada tahun 1895. Pada tahun 1970-an mengalami perubahan, ketika perhatian yang signifikan ditarik ke pulau-pulau tersebut karena adanya potensi cadangan minyak di Laut China Timur. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016)

Sejarah Konflik

Kontroversi Kepulauan Senkaku sebenarnya sudah berlangsung lama, terutama setelah survei Asian Far East Economic Commission (ECAFE) pada tahun 1969 mengidentifikasi adanya cadangan gas dan minyak yang cukup besar pada Kepulauan Senkaku. Penemuan ini telah menyebabkan negara-negara yang sangat dekat dengan kawasan, Cina dan Jepang, dan berada dalam konflik kepemilikan. Sampai kedua negara akhirnya sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Jepang-Cina pada tahun 1978, masing-masing akan terus berusaha untuk menunjukkan kedaulatan, dan sengketa Kepulauan Senkaku akan diselesaikan oleh generasi berikutnya. (Rahmanto, 2014)

Kemudian, Pada tahun 1992, Tiongkok memberlakukan Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan, yang secara eksplisit menggambarkan klaimnya atas pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Sejak 2008, Cina telah mengirim kapal pemerintah ke perairan Kepulauan Senkaku, dan berulang kali melakukan serangan ke perairan teritorial Jepang. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016)

Tahun 1996 merupakan masa ketegangan baru dalam hubungan kedua negara. Pada bulan Juni Jepang mulai membatasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Senkaku. Kemudian, Jepang membangun mercusuar pada bulan Juli di Kitakajima, Jepang membangun mercusuar di Kitakojima, salah satu pulau di Kepulauan Senkaku. Lalu kejadian tersebut menyebabkan kemarahan besar di Cina. Mengingat pentingnya hubungan bilateral antara kedua negara, kedua negara telah memutuskan untuk mencari penyelesaian sengketa. (Rahmanto, 2014)

Cina dan Jepang berusaha untuk mencari penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku melalui proses negosiasi yang dimulai sejak tahun 1998. Pada pertemuan itu negara Jepang dan Cina berusaha menyelesaikan sengketa yang ada dengan memisahkan ZEE. Tetapi negosiasi tidak memiliki hasil karena keduanya terus bersikeras pada posisi masing-masing. Karena itu, keduanya memutuskan untuk bertemu kembali pada 2004. Pertemuan yang berlangsung hingga 2008, akhirnya disepakati untuk melakukan pembangunan bersama di Laut Cina Timur, dan disepakati Jepang dan Cina. (Rahmanto, 2014)

Dilihat dari perkembangan konflik ini pada tahun 2009, ditemukan banyak demonstran yang meneriakkan jargon anti Jepang kepada kedutaan Jepang di Beijing dan di depan kediaman duta besar Jepang di Cina, dengan jargon “Kepulauan Diaoyu milik kami,” kata mereka. Atau “Runtuhkan imperialisme Jepang.” Pihak keamanan membiarkan para aksi demonstran dan membuat tempat untuk para wartawan, yang biasanya langsung membubarkan kerumunan demonstrasi di ibukota "Jepang yang kerdil harus meninggalkan Kepulauan Diaoyu. Dari paparan yang telah disampaikan di atas terkait sejarah konflik Pulau Senkaku antara Jepang dan Cina sudah melalui beberapa tahapan guna mencapai tujuan perdamaian sengketa tersebut. Akan tetapi, kedua negara tersebut masih memiliki keinginan tinggi untuk memiliki pulau Senkaku tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat potensi yang menguntungkan di dalam pulau Senkaku tersebut.

Kebijakan Cina Terkait Kepulauan Senkaku

Kebijakan dari negara Cina mengenai Kepulauan Senkaku ini mengklaim bahwa kepulauan senkaku merupakan kepulauan yang tidak bersengketa, karena kepulauan diayou atau biasa disebut senkaku merupakan bagian dari warisan wilayah berdasarkan sejarah, hukum yang berlaku dan geografi [\(Tamisari, 2017 : 3\)](#) melalui sejarah Cina mencatat bahwa Cina menemukan Kepulauan dan memberi nama Kepulauan Diayou pada abad 14 dan 15 dan Kepulauan Senkaku sudah lama menjadi bagian dari Ming (1368-1644) dan Dinasti Qing (1644-1912). [\(Rizki Roza, 2012, hal. 7\)](#) Secara geografis, Kepulauan Senkaku menjadi bagian dari kelompok pulau Taiwan (Formosa). Apalagi laut di sekitar Kepulauan Senkaku sudah lama dimanfaatkan oleh para nelayan Cina. Cina juga mengklaim memiliki aktivitas administratif lama di Kepulauan Senkaku, termasuk

memata-matai bajak laut. Menurut Tiongkok, setelah Perang Tiongkok-Jepang tahun 1895, Tiongkok terpaksa menyerahkan Taiwan/Kepulauan Formosa kepada Jepang beserta semua yang merupakan pulau bagian dari Kepulauan Formosa dibawah Perjanjian Shimonoseki.

Kebijakan Jepang Terkait Kepulauan Senkaku

Dalam hal ini, kebijakan pertahanan Jepang terkait dengan konflik Kepulauan Senkaku, Jepang telah meningkatkan jumlah jet tempur untuk menghalangi dan mengusir semua pesawat militer Cina yang mencoba mendekati Kepulauan Senkaku dan Diaoyu, zona konflik di Laut Cina Timur. Jepang sendiri mengatakan tentara akan menghentikan semua tentara Cina dan yang terutama yang lepas landas dari pangkalan udara di provinsi Fujian, letaknya dekat Kepulauan Senkaku (CNN Indonesia, 2020)

Kebijakan Jepang sendiri terkait Kepulauan Senkaku sejak munculnya berita dari UNCAFE terdapat sumber daya alam yang melimpah pada kepulauan tersebut sekitar tahun 1969 pemerintah Okinawa telah membangun beton yang menunjukkan bahwa beton tersebut merupakan tanda nasional di Kepulauan Senkaku yang bertuliskan “Uotsorishima, Kepulauan Senkaku, Yaeyama” yang ditulis pada bagian depan beton “2392 Tonoshiro, Ishigaki-shi, Prefektur Okinawa; didirikan oleh Kota Ishigaki” di bagian belakang beton. ([Han-yi Shaw,1999, hal. 13](#))

Dengan begitu ketegangan semakin meningkat, Sekitar tahun 1996, ketegangan muncul setelah Jepang meratifikasi Konvensi 1982 tentang Hukum Laut pada Juli lalu, yang menetapkan zona ekonomi eksklusif 200 mil sehingga negara lain tidak diizinkan untuk menangkap ikan, dan pada 14 Juli, kelompok sayap kanan Jepang telah memasang mercusuar di sebuah pulau di Senkaku yang terbuat dari aluminium bertenaga surya yang tingginya 5 meter, sehingga mereka meminta persetujuan dari pemerintah Jepang untuk menjadikannya pelayaran resmi Jepang. Mercusuar itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh angin topan akan tetapi mercusuar tersebut akan segera diperbaiki pada bulan September. ([Han-yi Shaw,1999, hal. 18](#))

Kepentingan Nasional Jepang dan Cina di Kepulauan Senkaku

Perairan di sekitar Kepulauan Senkaku menjadi sumber hasil laut bagi Jepang dan Cina, Laut Cina Timur dan perairan di sekitar merupakan Karakter dari nama Cina kepulauan tersebut berarti “bagan” lalu nama Jepang untuk Pulau Uotsuri, yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Senkaku berarti “pulau pancing”. (Op.Cit, hal. 14) Kebanyakan Nelayan lokal Okinawa ini terbiasa menangkap ikan tuna, bonito, dan sea bream di perairan sekitar Kepulauan Senkaku. Bagi Cina, Laut Cina Timur merupakan kawasan penting untuk perikananannya, dimana sekitar 34% merupakan tangkapan laut Cina dari Laut Cina Timur. Cina lebih sering menangkap ikan di perairan yang disengketakan dan di perairan teritorialnya sendiri karena permintaan tangkapan laut yang lebih tinggi.

Analisis Dampak Sengketa Kepulauan Senkaku terhadap Stabilitas Keamanan Jepang

Di era kedaulatan modern, sengketa wilayah antar negara merupakan sumber utama konflik dan kekerasan dalam sistem internasional. Hal ini tidak hanya menyebabkan konflik dan kekerasan, tetapi juga menghambat kerjasama antar negara. Dalam sengketa Kepulauan Senkaku, Jepang berusaha mempertahankan klaim teritorialnya atas pulau tersebut, sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Sejak klaim Cina atas Kepulauan Senkaku, Jepang telah mengidentifikasi masalah tersebut sebagai salah satu prioritas keamanan nasionalnya.

Kebangkitan Militer Jepang dalam Sengketa Kepulauan Senkaku

Kebangkitan militer Jepang tidak serta merta ikut mengurangi ketegangan di kawasan Asia, justru malah memicu babak baru perlombaan senjata di suatu kawasan. Militer Jepang kini telah menjelma menjadi salah satu angkatan bersenjata dengan teknologi tercanggih di dunia. Meski begitu, JSDF belum terlibat dalam pertempuran skala global. *Japan Self Defense Force* (JSDF) hanya menjalankan misi global di bidang kemanusiaan non-tempur. Perdana Menteri Shinzo Abe secara bertahap berhasil membangun militer Jepang meskipun mendapat kritikan keras. Sementara itu, isu di Laut Cina Timur yaitu di Kepulauan Senkaku mengkhawatirkan. Jepang dan Cina telah mampu menghindari insiden besar di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir. Namun, dengan peningkatan kemampuan Cina dan Aliansi Jepang-Amerika Serikat, maka kemungkinan insiden tersebut akan bersitegang kembali. Sejak 1947, konstitusi Jepang telah melarang

pembentukan pasukan tradisional. Pada saat itu, Jepang hanya memiliki Pasukan Bela Diri (SDF), yang misinya adalah melindungi daratan Jepang. Pasukan Bela Diri di dalam perbatasan ini melakukan peran paramiliter, logistik, dan dukungan untuk pasukan AS yang ditempatkan di Jepang dengan imbalan janji perlindungan. Banyaknya masyarakat yang mendukung negara Jepang untuk normalisasi militer atau remilitarisasi sejak untuk pertama kalinya sejak 9/11, pasukan SDF dikirim ke luar negeri ke Afghanistan dan Irak. Mereka hampir seluruhnya merupakan peran berbasis dukungan, tetapi posisi mereka dipandang sebagai simbol perubahan sikap dan menantang konstitusi. Jepang juga sudah menjadi salah satu pemasok pertahanan terbesar di dunia, dan SDF adalah kekuatan yang tangguh dalam dirinya sendiri, meskipun ditargetkan secara sempit dan bersifat protektif, tidak termasuk pembom jarak jauh atau rudal, dan tidak ada kapal induk atau kapal selam nuklir. Jepang juga berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengalihkan fokus itu dan memperluas operasi militernya, baik dari Amerika Serikat maupun dari dalam, dan menghadapi ancaman mengerikan dari Cina dan Korea Utara.

Jepang, setelah berakhirnya Perang Dunia II, selalu menjaga sikap damai terhadap militernya. Dalam Pasal 9 konstitusi saat ini yang dirancang pada tahun 1947, Jepang berjanji untuk "Melepaskan perang sebagai hak berdaulat bangsa". Artikel tersebut, yang disusun di bawah pengawasan AS, melarang setiap upaya Jepang untuk menggunakan kekuatan atau perang untuk menyelesaikan sengketa internasional apapun. (Akhras, 2019).

ARTICLE 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. (2) To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

Pasal tersebut memperjelas bahwa rakyat Jepang secara sadar telah meninggalkan perang sebagai salah satu hak negara mereka, yang mengakibatkan Jepang tidak memiliki kekuatan militer dalam bentuk apapun sebagai sarana untuk menjaga keamanan nasional. Dalam interaksi internasional, Jepang tidak menutup diri dari semua aktor yang ada, tetapi akan memimpin dalam isu perang dan anti militerisme. Oleh karena itu, mereka harus

mengembangkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai pasifisme seperti yang diabadikan dalam konstitusi.

Namun dengan keterbatasan militernya, Jepang mendirikan Pasukan Bela Diri (SDF) pada tahun 1954. Direorganisasi dari *National Policy Reserve* (NPR) bentukan Jepang, yang dibentuk dan dibantu oleh Sekutu ketika Perang Korea pecah pada tahun 1950 dan mereka membutuhkan Jepang untuk dapat melindungi diri dari ancaman lain ketika mereka tidak bisa. Opini publik tentang SDF selalu beragam, di mana telah dikritik oleh negara asing karena dianggap melanggar Pasal 9. Pemerintah Jepang telah lama membenarkan keberadaan (dan pertumbuhannya) dengan mengatakan bahwa Pasal 9 tidak melarang pembentukan kekuatan militer namun hanya digunakan untuk pertahanan diri atau sebagai strategi keamanan nasional negaranya (Takahara, 2007). Di Jepang sendiri, opini publik berbeda-beda tetapi sebagian besar positif dalam beberapa tahun terakhir karena kegiatannya dalam bantuan bencana dan perlindungan sipil, bahkan mencetak tingkat persetujuan 91,7% pada tahun 2012 (Public Relations Office, Cabinet Office, 2012).

Dapat dilihat bahwa tindakan Jepang mempersenjatai diri sendiri dapat dilihat sebagai tindakan reaksioner terhadap agresi dan dominasi Cina yang semakin meningkat di Sub-Benua Asia Timur, di Laut Cina Timur khususnya di Kepulauan Senkaku. Meski begitu, tindakan Cina yang paling mengundang reaksi dari Jepang adalah cara Cina bertindak setelah Jepang membeli Kepulauan Senkaku. Pulau-pulau tersebut, yang sebelumnya dimiliki secara pribadi oleh keluarga Jepang, dibeli dengan harga sekitar 2,05 miliar (sekitar \$26 juta) pada tahun 2012 (BBC News, 2012). Dikatakan bahwa alasan pembelian itu karena nilai ekonomisnya, karena pulau-pulau itu terletak dekat dengan ladang gas alam dan daerah penangkapan ikan yang menguntungkan. Reaksi Cina sangatlah parah, dengan protes pecah di seluruh Cina, sementara pemerintah Cina menggunakan alat ekonomi untuk mengintimidasi Jepang, seperti mengurangi jumlah turis Cina ke Jepang atau membatasi ekspor. Selain ekonomi, pemerintah Cina juga meningkatkan aktivitas militernya di dekat Kepulauan Senkaku. Di bidang maritim, kapal maritim Cina telah melakukan penyusupan ke wilayah teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, dimana sejak tahun 2014 dilaporkan bahwa rata-rata kapal Cina telah

melakukan penyusupan di laut teritorial Jepang sebanyak tujuh sampai sembilan kali dalam sebulan. Ditambah lagi dengan kehadiran milisi maritim (nelayan sipil yang telah dilatih oleh pemerintah Cina) di dekat Kepulauan Senkaku (Edmund J. Burke, 2018). Aktivitas udara Cina juga meningkat sejak pembelian, baik dari segi kompleksitas maupun jumlah serangan yang terjadi. Pada Juli 2013, Cina dengan berani melakukan penerbangan militer di atas Selat Miyako di Jepang, dan lagi pada 2015, di mana pesawat pengebom Cina terbang di atas Selat Miyako untuk kegiatan khusus. Pemerintah Cina membenarkan operasi udara ini sebagai mata-mata kontra di daerah perbatasan sambil memverifikasi situasi yang tidak biasa di perbatasan. Pengumuman Cina tentang zona identifikasi pertahanan udara baru juga meningkatkan ketegangan antara kedua negara (Denyer & Harlan, 2013).

Untuk melindungi negaranya dari ancaman di laut, pada Maret 2018 Jepang membentuk Brigade Amfibi Penempatan Cepat yang berkekuatan 2.100 orang, yang fungsinya untuk melindungi (dan jika perlu untuk membangun kembali) kepulauan Jepang, yang mungkin menjadi target serangan invasi atau invasi oleh negara lain. Ada juga upaya untuk membuat pangkalan militer di pulau-pulau kecil seperti Amami Oshima, Yonaguni, dan Miyako untuk membantu mempertahankan wilayah ini sebagai "tembok barat daya" terhadap kemungkinan agresi di masa depan (Denyer & Harlan, *China sends warplanes to new air defense zone after U.S., Japan, S. Korea incursions*, 2013).

Mengingat sengketa Senkaku, tampaknya Jepang memahami adanya dilema keamanan. Hal ini terlihat dalam pembangunan kembali militer Jepang yang dapat dikatakan sebagai bentuk aksi reaksioner. Semua upaya Jepang tidak akan membuahkan hasil jika Cina tidak menegakkan klaimnya atas Senkaku, ditambah dengan kekhawatiran yang berkembang bahwa Amerika Serikat tidak akan selalu mampu atau mau memberikan perlindungan di Jepang. (Bhide, 2019). Terlihat juga bahwa Jepang memahami bahwa tindakan mereka akan menarik perhatian Cina untuk memberikan reaksi, karena mereka tidak memiliki niat untuk melanjutkan perang atau konflik dengan Cina, terbukti ketika seorang pejabat tinggi Jepang menyatakan bahwa memprovokasi Cina adalah tindakan "bunuh diri bagi negara mereka" (Ward, 2019). Bahkan Shinzo Abe memahami hal ini dan setuju untuk bertemu dengan Xi Jinping untuk membicarakan masalah keamanan negara, sambil membuka era

baru hubungan Jepang dan Cina (BBC, 2019). Selain itu, Jepang terlihat bersedia bekerjasama dengan Cina, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena meskipun dengan segala kerugian yang dapat ditawarkan Cina kepada Jepang, Cina masih merupakan bagian penting dari kepentingan ekonomi Jepang (perdagangan, investasi, dan pariwisata).

Keamanan Militer : Perubahan Strategi Pertahanan Jepang Akibat Sengketa Kepulauan Senkaku

Perubahan strategi defensif atas sengketa Kepulauan Senkaku terus menimbulkan ketegangan yang meningkat. Pasukan angkatan laut Cina yang dikerahkan di sekitar Kepulauan Senkaku telah mendorong Jepang untuk meningkatkan kemampuannya dengan meningkatkan kekuatan militernya di Kepulauan Barat Daya. Penjaga Pantai Jepang melaporkan pada 22 Juli 2020, bahwa kapal patroli Cina berlayar 24 mil laut di sekitar Kepulauan Senkaku selama 100 hari berturut-turut. Ini adalah rekor terpanjang sejak 2012, ketika pemerintah Jepang menasionalisasi beberapa pulau (Sebayang & Arbar, 2020). Selain itu, Kapal penjaga pantai Cina mengejar kapal nelayan Jepang penangkap ikan di perairan teritorial 12 mil laut di sekitar pulau, yang terjadi selama dua kali dalam tiga bulan terakhir.

Peningkatan anggaran militer

Ketegangan baru atas sengketa teritorial muncul kembali pada tahun 2015, ketika Jepang pertama kali mengkonfirmasi keberadaan kapal-kapal China yang bersenjata lengkap, dan akhirnya Pemerintah Jepang memutuskan untuk membelanjakan pertahanan terhadap pengaruh China yang semakin besar di kawasan. Kami telah menyetujui pengeluaran 5 triliun yen. Sebagian besar anggaran digunakan untuk mendanai perangkat keras yang dirancang untuk memantau daerah-daerah terpencil di nusantara. Pemerintah Tokyo juga menegaskan bahwa Jepang berencana membangun fasilitas rudal di pulau-pulau yang berdekatan dengan Kepulauan Senkaku. Selain itu, 60 miliar yen telah dialokasikan dari anggaran militer Jepang untuk relokasi pangkalan Angkatan Laut AS di Okinawa. (McCurry, 2015). Di tahun tersebut juga pemerintahan Jepang berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat, di mana relasi tersebut terwujud dalam dirilisnya U.S.-Japan Defence Guidelines pada tahun 2015. Dokumen tersebut menguraikan hal-hal seperti hubungan tanggung jawab yang seimbang tidak hanya antara

Pasukan Bela Diri Jepang dengan pasukan Amerika Serikat, melainkan juga kedua pemerintahan tersebut secara keseluruhan (Sakoda, 2015). Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, pada waktu itu mengatakan Kepulauan Senkaku berada dalam perlindungan payung Amerika Serikat, ini juga merupakan pertama kalinya Amerika Serikat secara eksplisit mengatakan hal tersebut (Oliveira, 2021).

Ketegangan antara Jepang dan China adalah masalah keamanan tradisional yang berkembang di Asia Timur (terutama Laut China Timur), dengan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu menjadi permasalahan utama. Perselisihan antara kedua negara telah mendorong masing-masing negara untuk bereaksi secara militeristik, dengan China berusaha meningkatkan kehadiran dan pengaruhnya dengan melakukan operasi militer di dekat kepulauan ini. China melakukan hal tersebut dengan sengaja menyelidiki perbatasan maritim Jepang, melakukan operasi sambil mempersenjatai nelayan mereka untuk menjadi 'milisi maritim'. China juga telah meningkatkan aktivitas udara mereka, melakukan pelatihan untuk pilot mereka dan bahkan menciptakan dan menegakkan zona pertahanan udara.

Sementara Jepang, yang tentaranya telah 'tertidur' selama sekitar 70 tahun, sedang dibangun kembali sebagai reaksi terhadap gerakan China, ditambah dengan desakan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa SDF harus dapat melindungi kedaulatan Jepang dengan sendirinya jika Amerika Serikat tidak dapat membantunya dari China. Untuk meningkatkan keamanan nasionalnya, Jepang menaikkan anggaran militer mereka dan menciptakan pangkalan militer untuk menangani kemungkinan adanya invasi dari China di tempat-tempat tertentu sekita Kepulauan Senkaku.

KESIMPULAN

Hubungan Jepang dengan China begitu terkait mulai dari wilayah geografis yang berdekatan, begitu juga dalam bidang ekonomi. Persengketaan Kepulauan Senkaku begitu menarik perhatian dua negara ini untuk saling mengklaim dan mempertahankan kepemilikannya. Bila dilihat dari sejarahnya, Jepang merupakan negara yang sah atas kepemilikan Kepulauan Senkaku. Terbukti dengan Perjanjian Pembalikan Okinawa tahun 1972 dimana Kepulauan Senkaku dimasukkan sebagai bagian dari wilayah yang dipegang oleh Jepang. Lebih jauh lagi pada abad 19 Kepulauan Senkaku sudah dimasukkan ke dalam wilayah Jepang.

Namun, semenjak dikemukakan bahwa di sekitar perairan Kepulauan Senkaku terdapat potensi minyak dan gas yang cukup besar hal ini menyulut sengketa antara Jepang sebagai negara pemilik yang sah dengan China. China memiliki klaim atas Kepulauan Senkaku didasarkan pada persepsi tanah air yang sudah berabad-abad dimiliki. Tetapi persengketaan yang terjadi membesar saat ditemukannya potensi minyak dan gas. Lalu, persengketaan dua negara ini menjadi hal yang tak bisa dihindarkan karena kedua negara ini sama-sama membutuhkan minyak dan gas. China dan Jepang menjadi pengimpor minyak terbanyak. Dan keberadaan potensi minyak dan gas di Kepulauan Senkaku perlu dimiliki menjadi titik persengketaan China dan Jepang yang sama-sama memiliki kepentingan.

Dengan adanya persengketaan Kepulauan Senkaku tidak hanya stabilitas keamanan Jepang saja yang terganggu. Namun juga hubungan dua negara yang semakin memburuk. Persengketaan Kepulauan Senkaku membuat Jepang memutuskan untuk merubah sikap pasifisnya menjadi lebih aktif dalam mempertahankan keamanannya. Sampai pada akhirnya Jepang menjadi negara dengan anggaran biaya militer terbesar. Merasa terancamnya stabilitas keamanan dari pihak Jepang membuat negara ini memutuskan untuk membuat serangkaian kebijakan yang proaktif. Mulai dari diresmikannya kebijakan keamanan dan pertahanan, membentuk Dewan Keamanan Nasional yang meningkatkan

intensitas pembahasan strategi keamanan dan pertahanan. Selain itu juga Jepang semakin mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dengan cara latihan militer yang dilakukan tahun 2020. Latihan militer juga dilakukan dengan Inggris di tahun 2021. Upaya lain Jepang dengan memperkuat pulau-pulau di sekitarnya dengan Pasukan Bela Diri Jepang seperti di pulau Miyako, Amami Oshima, dan Yonaguni.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos.,M.A. selaku dosen pembimbing 1, Marten Hanura, S.IP, MPS selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Fendy E. Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Akhras, J. (2019, April 18). *Japan's Move Away from Pacifism*. Retrieved from SIGMA IOTA RHO JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS:
<http://www.sirjournal.org/blogs/2019/4/17/japans-move-away-from-pacifism>
- BBC. (2019, Juni 27). *Japan's Abe and China's Xi Jinping meet amid trade war fears*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-48782245>
- BBC News. (2012, September 5). *Japan government 'reaches deal to buy' disputed islands*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-19485565>
- Bhide, J. (2019, Februari 15). *REARMING A FORBIDDEN MILITARY: JAPAN'S SELF-DEFENSE FORCE & CONSTITUTIONAL REVISIONS*. Retrieved from Global, Global Policy Studies & International Security, Misc :
<https://bainesreport.org/2019/02/rearming-a-forbidden-military-japans-self-defense-force-constitutional-revisions/>
- Denyer, S., & Harlan, C. (2013, November 28). *China sends warplanes to new air defense zone after U.S., Japan, S. Korea incursions*. Retrieved from The Washington Post:
https://www.washingtonpost.com/world/japan-south-korea-military-jets-cross-through-china-air-defense-id-zone/2013/11/28/6285d350-5816-11e3-bdbf-097ab2a3dc2b_story.html
- Denyer, S., & Harlan, C. (2013, November 28). *China sends warplanes to new air defense zone after U.S., Japan, S. Korea incursions*. Retrieved from The Washington Post:
https://www.washingtonpost.com/world/japan-south-korea-military-jets-cross-through-china-air-defense-id-zone/2013/11/28/6285d350-5816-11e3-bdbf-097ab2a3dc2b_story.html

Edmund J. Burke, d. (2018). *China's Military Activities in the East China Sea: Implications for Japan's Air Self-Defense Force*. RAND Corporation.

Harris, J., & Wang, T. (2017, Juni 1). *Japan's rising right-wing nationalism*. Retrieved from VOX: <https://www.vox.com/videos/2017/6/1/15727090/borders-japan-right-wing-nationalism>

Huang, K. (2019, Juni 27). *China 'wants new security relationship with Japan' as US trade war leaves Beijing looking for friends*. Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3016221/china-wants-new-security-relationship-japan-us-trade-war>

Kyodo. (2019, April 11). *The Japan Times*. Retrieved from Poll shows 54% oppose revision of Japan's pacifist Constitution under Abe's watch: <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/11/national/politics-diplomacy/poll-shows-54-oppose-revision-japans-pacifist-constitution/#.XZoV4OczaRt>

Buku

Adam Watson, 1984. *The Dialogue Between States*, Methuen, London, hal. 223

Bambang Darmono. 2010 *Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. (Yogyakarta: Jurnal Ketahanan Nasional: Nomor XV (1) April 2010. Hal 7-8 dan 17-18

Barry Buzan. 1991. *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. (Boulder: Lynne Rienner Publisher).

[Barry Buzan, 1991. *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, \(London: Harvester Wheatsheaf Publisher, 1991\)](#)

Barry Buzan, (1987), *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, London: Macmillan.

Barry Buzan, 1991. Op Cit.,halaman 19-20

Barry Buzan. 1991. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Berridge, G. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice, 2nd Edition*. New York: Palgrave.

David Mutimer. 1999. *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd), hal.77

O'Shea, Paul, Disertasi : *Playing the Sovereignty Game: Understanding Japan's Territorial Disputes*, the University of Sheffield.

[Professor Alfred Soons \(Utrecht University\) dan Professor Nico Schrijver \(Leiden University\), Op.Cit, hal. 14](#)

Artikel Jurnal

Barry Buzan, (1987), *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, London: Macmillan.

Barry Buzan, (1991). Op Cit.,halaman 19-20

[Barry Buzan, 1991. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era Second Edition \(London: Harvester Wheatheaf, 1991\) hal 18.](#)

[Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era Second Edition \(London: Harvester Wheatheaf, 1991\) hal 21 – 24.](#)

Barry Buzan. (1991). *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Christianty, Destrina, Dkk. (2019). *Geopolitik China dan Jepang di Asia Timur: Sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku*. *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 3, No. 1

Donald E. Nuechterlein, “*The Concept of National Interest: A Time for New Approach*”, *ORBIS. A Journal of World Affairs*, vol.23, 1979, hal. 75-76.

Evam Luard, *Basic Text in International Relation : The Evolution of Idea About International Society*, (Macmillan Academic, New York, 1992), hlm. 119.

Hill, Christopher, dan Margot Light, *Foreign Policy Analysis*, dalam Margot Light dan A. J. R. Groom (eds), *International Relations: A Handbook of Current Theory*, London: Frances Pinter; and Boulder, Colorado, Lynne Rienner, hlm. 157.

James N. Rosenau, "Introduction : New Directions and Recurrent Questions in the Comparative Study of Foreign Policy", *New Directions in the Study of Foreign policy*, eds. Charles F. Hermann, Charles W. Kegley, Jr, James N. Rosenau , Boston : Allen & Unwia, 1987, hlm.

James N. Rosenau, *Linkage Politics : Essays on the Convergence of National and International Systems*, New York : The Free Press, 1969, hlm. 1-16

Katsumata, Hidemichi, Japan's Strategy against Senkaku Islands Dispute, Monthly Magazine "Sekai No Kansen", Oktober 2012.

Maria, F. (2005). *Ekaterinburg The roots of Sino-Japanese differences over the Senkaku (Diaoyudao) Islands*

Morghentau, Hans, dan Kenneth Thompson, *Politics Among Nations*, 6th ed, New York : Alfred Knopf.

Moteki, Hiromichi, The Senkaku Islands Constitute an Intrinsic Part of Japan, Jepang : Society for the Dissemination of Historical Fact, 2010.

Website

"Alasan Jepang Berhak". [Online] Available at: <http://www.tribunnews.com/internasional/2012/11/20/ini-alasan-mengapa-jepang-lebih-berhak-atas-pulau-senkaku?page=3> / [Diakses pada 14 Maret 2020]

Cheng, 2012. "Diaoyu Islands Dispute". [Online] Available at : <http://www1.american.edu/TED/ice/DIAOYU.HTM> [Diakses pada 14 Maret 2020]

CNN Indonesia, 2020. "Jepang Tambah Jet Tempur Halau China dari Pulau Senkaku" [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200720104339-113-526570/jepang-tambah-jet-tempur-halau-china-dari-pulau-sengketa> [Diakses pada 13 Juli 2021]

Kompas, 2021. "Jepang Bersekutu dengan AS untuk Memprotes Pasukan Laut China di Kepulauan Senkaku" [Online] Available at: <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/30/215830270/jepang-bersekutu-dengan-as-untuk-memprotes-pasukan-laut-china-di?page=1> [Diakses pada 13 Juli 2021]

Pikiran Rakyat, 2021. “*China Semakin Menjadi, Kirim DUa Kapan di Teritorial Jepang Klaim Kepemilikan Perairan di Pulau Senkaku*” [Online] Available at: <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011395048/china-semakin-menjadi-kirim-dua-kapal-di-teritori-jepang-klaim-kepemilikan-perairan-di-pulau-senkaku?page=2> [Diakses pada 13 Juli 2021]

Suci, S. 2019. “*Hadapi China, Jepang Bentuk Unit Pertahanan di Kepulauan Senkaku*” [Online] Available at: <https://dunia.tempo.co/read/1242928/hadapi-China-jepang-bentuk-unit-pertahanan-di-kepulauan-senkaku> [Diakses pada 21 Maret 2020]

Walter, P. 2012. “*Konflik Kepulauan Senkaku antara Jepang dan China*”. [Online] Available at: <https://www.seniberpikir.com/konflik-kepulauan-senkaku-antara-China-jepang/> [Diakses pada 14 Maret 2020]